

ABSTRAK

MODERNISASI PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI PETANI DI DIY TAHUN 1968-1984

Oleh: Lestari Eka Pratiwi
11407141020

Modernisasi pertanian merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi. Produksi padi yang tinggi dapat menjamin ketahanan pangan masyarakat sehingga dapat mencapai swasembada pangan. Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Hal itu merupakan hasil nyata dari program modernisasi pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah. Modernisasi pertanian dibalik keberhasilannya juga berpengaruh terhadap sosial ekonomi petani khususnya petani kecil. DIY adalah salah satu daerah yang masyarakatnya bermata pencaharian petani khususnya di wilayah pedesaan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan modernisasi pertanian dan pengaruhnya terhadap sosial ekonomi petani di DIY pada tahun 1968-1984.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. Pertama, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. Ketiga, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta sejarah yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. Keempat, historiografi atau penulisan yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan geografis, keadaan penduduk dan kondisi pertanian di DIY menyebabkan sektor pertanian menduduki peranan penting bagi masyarakat. Penerapan modernisasi pertanian yang merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dapat meningkatkan produksi padi di DIY secara signifikan. Modernisasi pertanian yang diterapkan di DIY telah memberi pengaruh baik di bidang sosial dan bidang ekonomi petani antara lain pengaruh terhadap pelapisan sosial masyarakat, pengaruh terhadap sistem pengolahan sawah, pengaruh terhadap ekosistem dan lingkungan, dan pengaruh terhadap pendapatan petani.

Kata Kunci: *Modernisasi Pertanian, Sosial Ekonomi, DIY.*

A. Pendahuluan

Soeharto yang menjabat Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 berusaha memperbaiki perekonomian Indonesia melalui kebijakan pertanian yaitu pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat Indonesia dengan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. Hasil nyata dari pembangunan pertanian sudah mulai terlihat sejak tahun 1968. Pembelian beras dalam negeri oleh pemerintah dapat mencapai lebih dari 90% pada tahun 1968. Peningkatan jumlah produksi beras juga terjadi pada tahun 1969 yang mencapai 11,14 juta ton. Pemerintah dalam usahanya mengamankan persediaan pangan melaksanakan pembelian padi dan beras untuk memperbesar stok nasional, sekaligus menjaga kestabilan harga beras untuk melindungi petani produsen dari kemerosotan harga beras di waktu panen raya.¹

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada intinya bertujuan untuk meningkatkan produksi beras dan memperbaiki taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat petani. Produksi beras yang tinggi akan berpengaruh pada ketahanan pangan masyarakat. Produksi pertanian yang tinggi juga akan menambah penghasilan yang diperoleh petani. DIY adalah salah satu daerah di Pulau Jawa yang ikut melaksanakan pembangunan pertanian. Produksi padi di DIY sebelum adanya kebijakan pembangunan pertanian pernah mengalami

¹ Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 154.

peningkatan pada tahun 1950-1958. Jumlah produksi padi tahun 1950 sekitar 132.954 ton dan tahun 1958 sekitar 224.664 ton.²

Program pembangunan pertanian di DIY dilaksanakan melalui program Bimbingan Massal (Bimas) yaitu Bimas Padi. Program Bimas Padi dilaksanakan di DIY tahun 1969-1970. Program Bimas Padi sukses dalam meningkatkan produksi beras di DIY. Kesuksesan tersebut dapat dilihat dari rata-rata produksi beras di DIY pada tahun 1981 yaitu sebesar 118,84 ton. Rata-rata pembelian dan distribusi beras di Jawa Tengah dan DIY menunjukkan bahwa beras untuk distribusi lokal dapat dibeli 58 persen dari jumlah minimum yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Bimas secara teknis tidak mengalami kendala, namun bagi peserta Bimas yang merupakan petani produsen beras program ini agak membebani mereka. Petani harus mengeluarkan biaya tambahan yang berupa biaya pengangkutan pupuk dan gabah yang diangkut dari ladang ke kantor Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Biro Pusat Statistik dalam kaitannya dengan batas garis kemiskinan menyebutkan bahwa laju perkembangan tersebut belum cukup mengangkat petani khususnya petani *gurem* atau petani kecil. Peningkatan produktivitas dan harga riil padi itu pun belum cukup menumbuhkan tingkat buruh tani dan buruh kasar di pedesaan.³

² Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982), hlm. 196.

³ Agus Pakpahan, dkk, "Perkembangan Kesejahteraan Petani", *Prisma*, No. 5/XXII/1993, hlm. 59.

B. Gambaran Umum Wilayah DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta secara astronomis terletak antara 7°30'-8°15' LS dan 110°-110°50' BT,⁴ secara geografis terletak di tengah Pulau Jawa bagian selatan, dan secara geologis termasuk zone tengah dan selatan dari propinsi geologi Jawa Tengah dan Jawa Timur.⁵ DIY berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di sebelah tenggara, Kabupaten Klaten di sebelah timur laut, Kabupaten Magelang di sebelah barat laut, Kabupaten Purworejo di sebelah barat, dan Lautan Indonesia di sebelah selatan. Luas wilayah DIY adalah 3.185,81 km², terbagi dalam daerah kotamadya dan empat kabupaten yaitu Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul yang masing-masing memiliki wilayah administratif.

Penduduk DIY tersebar di wilayah Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Persebaran penduduk di DIY adalah sebagai berikut, Kotamadya Yogyakarta sebanyak 13,9%, Kabupaten Sleman 23,8%, Kabupaten Bantul sebanyak 23,0%, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 24,7%, dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 14,6%. Pertambahan penduduk DIY menurut sensus penduduk tahun 1961-1971 rata-rata sebesar 1,19% per tahun, dan sensus penduduk tahun 1971-1980 rata-rata sebesar 1,1% per tahun.

⁴ Soemargono, *Profil Propinsi Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 44.

⁵ Kantor Pusat Data Propinsi DIY, *Monografi DIY Tahun 1979*, (Yogyakarta: Kantor Pusat Data, 1981), hlm. 3.

Tabel 1
Jumlah Penduduk DIY Menurut Kotamadya/Kabupaten
Tahun 1961-1984
(dalam jiwa)

Tahun	Kotamadya/Kabupaten				
	Yogyakarta	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo
1961	341.421	526.597	496.155	565.436	353.372
1970	390.363	595.476	574.317	619.226	390.273
1980	386.065	662.354	638.743	685.945	401.043
1981	394.295	673.687	644.779	690.015	403.557
1982	398.277	684.236	651.131	693.374	405.931
1983	408.033	698.789	658.870	697.278	408.710
1984	411.405	708.658	664.511	704.204	407.937

Sumber: Statistik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1970-1972, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1978 Bagian I, dan Yogyakarta Dalam Trend Statistik 1982-1986, hlm. 47.

Penduduk DIY secara umum menganut agama atau kepercayaan yang diakui oleh negara secara sah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Penduduk di DIY sebagian besar bekerja di sektor pertanian, karena wilayah DIY merupakan daerah agraris. Penduduk DIY yang bekerja di sektor pertanian mayoritas bermatapencaharian sebagai petani. Golongan petani di DIY terdiri dari petani kaya, petani kecil, petani *gurem*, dan buruh tani.⁶ Penduduk DIY yang bekerja di sektor pertanian sekitar 62,9%.

Pola penggunaan tanah di DIY pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pola penggunaan tanah di provinsi lain, namun yang membedakan adalah proporsi penggunaan dari setiap jenis lahan pertanian. Hal itu disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda di setiap kabupaten yang ada di DIY.

⁶ Djoko Suryo, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 22.

Tabel 2
Pola Penggunaan Tanah di DIY
(dalam hektar)

Penggunaan Tanah	Kotamadya/Kabupaten				
	Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul
Sawah	543	27.387	17.769	7.746	11.043,34
Tegalan	42	6.915	6.428	84.093	28.047,81
Pekarangan	1,447	16.110	18.092	24.493	10.797,19
Hutan	-	1.545	918,4	13.378	1.021,10
Lain-lain	101.9	5.609	7.477,6	18.826	7.718,10

Sumber: Kotamadya Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupatn Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul, hlm. 1.

Pertanian di DIY sebagian besar dikerjakan di lahan pertanian milik pribadi (*pekuleh*).⁷ Lahan pertanian yang dimiliki oleh petani di DIY pada dasarnya sangat beragam. Petani yang tidak memiliki lahan sawah atau tegalan biasanya melakukan sebuah cara agar tetap dapat bercocok tanam, antara lain dengan menyewa tanah, melakukan bagi hasil, menggadaikan tanah dan *srama*. Penanaman padi di DIY masih bertumpu pada kepercayaan petani terhadap aturan tradisional mengenai periode-periode menanam yang biasanya disebut dengan *pranata mangsa*⁸. Para petani beranggapan bahwa padi harus ditanam pada saat yang tepat (waktu yang baik), apabila mereka tidak menanam pada saat yang tepat akan menderita kerugian.

⁷ Lahan pertanian yang berada di atas tanah milik pribadi (*pekuleh*) tidak hanya dikuasai selama orang tersebut memegang jabatan dalam masyarakat desa saja, tetapi dapat dikuasai selamanya bahkan dapat diwariskan, dijual, dan digadaikan.

⁸ Pranata mangsa terdiri dari kata “pranata” dan “mangsa”. Kata “pranata” dalam bahasa jawa berarti pertanda dan “mangsa” yang berarti masa.

C. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Produksi Padi di DIY

Presiden Soeharto dalam upayanya melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi membuat suatu program yang disebut dengan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Rencana Pembangunan Lima Tahun dilaksanakan berdasarkan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia sangat antusias menyambut penemuan teknologi baru melalui Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan suatu istilah yang telah dikenal Indonesia sejak 1960-an. Pemerintah Orde Baru mencanangkan program Bimbingan Massal (Bimas) yang diadopsi dari program Revolusi Hijau pada tahun 1968.

Program Revolusi Hijau mulai dilaksanakan di Indonesia mulai tahun 1970.⁹ Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya beras.¹⁰ Pemerintah dalam usahanya meningkatkan produksi padi di DIY melaksanakan program intensifikasi pertanian. Pelaksanaan program Revolusi Hijau di DIY yang telah dimulai pada tahun 1964 kemudian dilanjutkan kembali dalam pelaksanaan Bimas Nasional pada tahun 1970. Pemerintah meluncurkan program intensifikasi yang dikenal dengan nama Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal).

Modernisasi pertanian yang merupakan bagian dari program Revolusi Hijau dilakukan dengan menerapkan metode *Panca Usaha Tani*, yaitu

⁹ Loekman Soetrisno, *Pertanian pada Abad ke-21*, (Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1998), hlm. 13.

¹⁰ Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 164.

penggunaan bibit unggul (PB 5 dan PB 8), pemupukan, pengairan, pemberantasan hama, dan teknik bercocok tanam. Modernisasi pertanian yang diterapkan sejak dilaksanakannya Bimbingan Massal (Bimas) telah meningkatkan produksi padi dan rata-rata produksi padi per hektar di masing-masing kotamadya/kabupaten di DIY. Produksi padi di DIY mengalami peningkatan setelah adanya program Bimas. Produksi padi sawah setelah adanya program Bimas selalu di atas 200.000 ton setiap tahunnya, namun produksi padi gogo hanya mengalami sedikit peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Tabel 3
Produksi Padi Sawah dan Padi Gogo di DIY Tahun 1968-1984
(dalam ton)

Tahun	Padi Sawah	Padi Gogo
1968	345.445,57	28.159,72
1969	327.949,50	24.160,00
1970	360.920,37	40.771,70
1971	430.973,99	28.932,22
1972	428.418,58	31.552,07
1973	527.237,48	40.961,45
1974	504.424,00	56.164,00
1975	493.783,00	71.606,00
1976	421.316,44	65.883,55
1977	420.237,08	65.971,26
1978	492.687,55	68.646,21
1979	395.450,76	10.079,64
1980	454.958,86	67.083,45
1981	533.521,99	122.892,97
1982	542.671,42	88.223,45
1983	516.667,00	107.102,00
1984	590.883,00	129.182,00

Sumber: Statistik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1972 Bagian II, hlm. 61, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1978 Bagian I, hlm. 237, dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1983 Bagian II, hlm. 9 dan Yogyakarta Dalam Trend Statistik 1982-1986, hlm. 36.

D. Pengaruh Modernisasi Pertanian terhadap Sosial Ekonomi Petani di DIY

Pengaruh positif yang diberikan dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah pengaruh terhadap produksi pertanian berupa meningkatnya produksi padi dalam waktu yang relatif singkat. Pengaruh negatif yang diberikan dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah munculnya masalah mengenai kerusakan lingkungan, masalah hak asasi petani, dan melemahnya fungsi institusi lokal.¹¹

Perubahan sosial merupakan pengaruh dari adanya penerapan modernisasi pertanian di bidang sosial masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya program Revolusi Hijau yang tidak sepenuhnya memberikan keuntungan kepada seluruh masyarakat pedesaan, artinya hanya beberapa rumah tangga petani yang mendapatkan keuntungan dari adanya program ini. Petani yang mendapatkan keuntungan dari program Revolusi Hijau berhasil menjadi petani kaya, sedangkan petani yang tidak mendapatkan keuntungan dari program ini tidak berhasil menjadi petani kaya.

Penerapan modernisasi pertanian di DIY menyebabkan semakin terlihatnya perbedaan antara petani kaya, petani miskin, dan buruh tani. Hal ini dapat dilihat dari luas rata-rata kepemilikan tanah baik sawah maupun pekarangan, seperti yang terjadi di Dusun Miri, Kelurahan Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY.

¹¹ Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi: Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 263-264.

Tabel 4
Distribusi Pemilikan Tanah di Dusun Miri, Kelurahan Sriharjo
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, DIY

Jenis Tanah	Jumlah Keluarga	Persentase	Luas Rata-rata Setiap Pemilik
Sawah	104	63%	0,20 ha
Pekarangan	123	75%	0,09 ha
Tanah lainnya	128	78%	0,24 ha

Sumber: Masri Singarimbun dan D.H. Penny, *Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1976, hlm. 35.

Luas rata-rata pemilikan tanah di Dusun Miri menunjukkan bahwa 63% dari jumlah keluarga memiliki tanah sawah seluas 0,20 hektar, 75% dari jumlah keluarga memiliki tanah pekarangan seluas 0,09 hektar, dan 78% dari jumlah keluarga memiliki tanah seluas 0,24% yang digunakan untuk keperluan lain.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Miri terdiri dari golongan petani kecil dan petani *gurem* atau buruh tani. Pengaruh dari adanya penerapan modernisasi pertanian terhadap pelapisan masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dikatakan sebagai *patron* dan *klien*. Pengaruh yang lain dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah dibatasinya wewenang petani.¹³

Penerapan modernisasi pertanian di DIY belum sepenuhnya tepat, terutama di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sifat tanahnya kering dan gersang.¹⁴ Petani di Kabupaten Gunungkidul yang mayoritas menanam jagung

¹² *Ibid.*

¹³ John Pontius, "Revolusi Hijau di Indonesia Selama Ini", *Prisma*, No. 2/XXIV/1995, hlm. 61.

¹⁴ P.J. Suwarna, *Gunungkidul-Teknologi dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Yayasan B.P. Basis, 1979), hlm. 16.

dan ketela merasa dipaksa untuk menanam padi. Penanaman padi yang gencar dilakukan pada pelaksanaan modernisasi pertanian tidak sepenuhnya merugikan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, namun juga memberikan keuntungan. Keuntungan tersebut terlihat pada perubahan gaya hidup masyarakat yang semula hanya mengkonsumsi ketela menjadi nasi.

Penerapan modernisasi pertanian di DIY telah memperkenalkan serta menyebarkan teknologi pertanian modern kepada petani. Penggunaan teknologi pertanian yang berbasis mesin canggih menyebabkan penggunaan tenaga manusia semakin berkurang. Petani sebelum adanya penerapan modernisasi pertanian lebih bersifat sosialis, artinya rasa kekeluargaan yang terbangun antara petani dan petani lainnya masih ada, sedangkan setelah adanya penerapan modernisasi pertanian lebih bersifat individualistis atau hilangnya rasa kekeluargaan yang pernah terbangun dengan sesama petani.

Pengaruh positif dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah meningkatnya pendapatan petani sebagai akibat dari meningkatnya produksi pertanian selama masa pelaksanaan modernisasi pertanian. Penggunaan bibit padi unggul jenis PB 5 yang menggantikan bibit padi IR 64, telah memberikan dampak positif terhadap produksi padi. Pengaruh negatif dari adanya program modernisasi pertanian antara lain terjadinya permasalahan dalam sistem kredit Bimas, dan kerugian ongkos produksi sebagai akibat dari kerusakan ekosistem (lingkungan).

Sistem kredit dalam program Bimas diadakan untuk membantu petani dalam memenuhi sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan peralatan pertanian. Pembayaran kredit dapat dilakukan dengan cara memberikan

angsuran secara tunai kepada BRI Unit Desa.¹⁵ Petani dalam menghadapi hal tersebut harus mempunyai cukup uang agar tidak terjadi tunggakan pembayaran kredit pada masa selanjutnya, namun yang terjadi justru sebaliknya. Peningkatan produksi padi di DIY menyebabkan hasil panen padi menjadi berlimpah.

Hasil panen padi yang berlimpah mendorong pemilik modal untuk membeli padi dari pemilik sawah atau disebut dengan sistem *tebasan*. Sistem *tebasan* merupakan sistem yang lebih efisien dari sistem *derep*, karena penggunaan tenaga kerjanya lebih terkontrol. Sistem *tebasan* menyebabkan petani *derep* yang sebelumnya telah bekerja pada lahan persawahan menjadi menganggur (tidak bekerja), karena pada sistem *tebasan* pihak *penebas* juga membawa tenaga *derep*. Penerapan modernisasi pertanian di DIY juga telah mengubah sistem *derep* yang lebih terarah.

E. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia merupakan langkah yang tepat, namun tidak berpengaruh pada kesejahteraan petani miskin dan buruh tani di pedesaan. Kesejahteraan petani miskin dan buruh tani hanya bisa diperbaiki pada tingkat yang sangat lamban. Hal ini disebabkan karena program hanya bisa dijangkau oleh petani yang memiliki tanah dan modal. Perubahan dan hubungan yang buruk antara petani miskin dan buruh tani dengan

¹⁵ Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pihak pemberi kredit dalam hal ini harus benar-benar yakin bahwa kredit yang mereka berikan dapat dikembalikan pada waktunya dengan bunga yang sudah ditetapkan. Salah satu cara untuk menjamin kembalinya kredit adalah petani harus memberikan jaminan (*borg*) seharga 125-150% dari besarnya hutang. Jaminan ini dapat berupa sawah yang ditanami padi, pekarangan, atau rumah.

para pemilik tanah sebagai akibat penggunaan bibit unggul dan teknologi pertanian telah menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan di kalangan petani itu sendiri.

Penerapan modernisasi pertanian merupakan salah satu bagian dari program Revolusi Hijau di Indonesia telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun bidang ekonomi. Modernisasi pertanian tidak hanya memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga memberikan pengaruh yang negatif kepada masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Pengaruh positif yang diberikan dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah pengaruh terhadap produksi pertanian berupa meningkatnya produksi padi dalam waktu yang relatif singkat. Pengaruh negatif yang diberikan dari adanya penerapan modernisasi pertanian adalah terjadinya perubahan di masyarakat pedesaan yaitu semakin terlihatnya stratifikasi sosial seperti golongan petani lapisan atas (petani kaya), petani lapisan sedang, dan petani miskin (petani *gurem*).

Daftar Pustaka

Arsip:

Biro Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Pemerintah Daerah DIY Tahun 1970*, Yogyakarta: Biro Statistik, 1971.

_____, *Statistik Pemerintah Daerah DIY Tahun 1971*, Yogyakarta: Biro Statistik, 1972.

_____, *Statistik Pemerintah Daerah DIY Tahun 1972*, Yogyakarta: Biro Statistik, 1973.

Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 1978 Bagian I*, Yogyakarta: Kantor Statistik, 1979.

Pusat Data Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Propinsi DIY Dalam Angka 1981 Bagian I*, Yogyakarta: Pusat Data Propinsi DIY, 1982.

_____, *DIY dalam Trend Statistik 1976-1980*, Yogyakarta: Pusat Data Propinsi DIY, 1982.

_____, *DIY dalam Trend Statistik 1979-1983*, Yogyakarta: Pusat Data Propinsi DIY, 1984.

_____, *DIY dalam Trend Statistik 1981-1985*, Yogyakarta: Pusat Data Propinsi DIY, 1986.

Buku dan Artikel:

Agus Pakpahan, dkk, "Perkembangan Kesejahteraan Petani", *Prisma*, No. 5/XXII/1993.

Djoko Suryo, *Gaya Hidup Masyarakat Jawa di Pedesaan: Pola Kehidupan Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Depdikbud, 1985.

John Pontius, "Revolusi Hijau di Indonesia Selama Ini", *Prisma*, No. 2/XXIV/1995.

Kantor Pusat Data Propinsi DIY, *Monografi DIY Tahun 1979*, Yogyakarta: Kantor Pusat Data, 1981.

Loekman Soetrisno, *Pertanian pada Abad ke-21*, Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud, 1998.

Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 1999.

Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.

Soemargono, *Profil Propinsi Republik Indonesia: Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992.

Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi: Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Suwarna P.J., *Gunungkidul-Teknologi dan Lingkungan*, Yogyakarta: Yayasan B.P. Basis, 1979.

Widjojo Nitisastro, *Pengalaman Pembangunan Indonesia: Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Yogyakarta, 15 Januari 2016

Pembimbing



Ririn Darini, M. Hum.
NIP. 19741118 199903 2 001

Reviewer



Miftahuddin, M. Hum.
NIP. 19740302 200312 1 006